

Implementasi Elektronik Government (E-Gov) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan Dumai Kota

Indrawan¹, Febri Yuliani², Harapan Tua³

^{1,2}Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

Email: indrawanindra2020@gmail.com

Abstrak

Elektronik government (*E-gov*) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan elektronik government bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta berkualitas dan terpercaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai dan faktor-faktor yang menghambat implementasi elektronik government di Kantor Kecamatan Dumai Kota. Untuk menggambarkan kenyataan di lapangan oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan program yang terdiri atas empat variabel yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi serta kemampuan dan karakteristik agen pelaksana yang menjelaskan bahwa implementasi elektronik government mampu meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai kota yang merasa benar-benar terbantu dengan adanya implementasi elektronik government. Faktor-faktor yang menghambat implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai Kota ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis di Kecamatan masih kurang, kurangnya dukungan pendanaan dan anggaran, dan sistem aplikasi yang belum terintegrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Elektronik Government, Kinerja Pegawai

Abstract

Electronic government (*E-gov*) is an effort to develop an electronic-based government administration by structuring management systems and work processes in the government environment that optimizes the use of information and communication technology. The use of e-government aims to provide information and services for citizens, business affairs, and other matters relating to government in an effective, efficient, transparent and accountable manner as well as quality and reliable. The purpose of this study was to determine the implementation of electronic government in improving employee performance and the factors that hinder the implementation of electronic government in the Dumai City District Office. To describe the reality on the ground, the researchers used descriptive qualitative research methods through interviews, field observations and documentation. The results of this study use the implementation of program policies which consist of four variables, namely environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources and the capabilities and characteristics of implementing agents which explain that the

implementation of electronic government is able to improve the performance of employees in Dumai City, who feel really helped. with the implementation of electronic government. The factors that hinder the implementation of electronic government in improving the performance of employees in the Dumai Kota sub-district are human resources (HR) who have technical expertise in the sub-district are still lacking, lack of funding and budget support, and application systems that have not been integrated.

Keywords: *Implementation, Electronic Government (E-Gov), Employee Performan*

PENDAHULUAN

Elektronik government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan elektronik government oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan yang di aplikasikan pada legislatif, yudikatif ataupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis.

Di Indonesia sendiri inisiatif ke arah elektronik government telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan elektronik government, yaitu dimulai saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government yang menginstruksikan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan elektronik government secara nasional.

Kualitas sumber daya aparatur dan organisasi yang baik dalam pengembangan elektronik goverment merupakan faktor yang sangatlah penting untuk mewujudkan visi misi kota Dumai menuju *Dumai Smart City*. Penerapan kebijakan elektronik government bukan saja dipahami sebagai bentuk pengalihan kerja instansi pemerintah dari sistem kerja manual ke sistem kerja komputerisasi atau berbasis digital/online, tapi secara filosofis penerapan elektronik government merupakan bentuk kerja birokrasi yang secara dinamis mengalami *distorsi* pada lingkungan eksternal organisasi atau adanya tuntutan yang mengharuskan suatu peru/bahan. Maka sangat jelas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan perubahan pola pikir dari birokrasi itu sendiri yang selama ini diberi label terkesan lamban, kaku dan memiliki banyak celah kesalahan serta sistem aplikasi yang belum terintegrasi. Meskipun pemerintah selalu mengembangkan program baru untuk pelayanan, tetapi masih saja terdapat permasalahan yang terjadi dalam lingkup internal maupun dari masyarakat.

Lahirnya kebijakan elektronik government sejatinya untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja penggunanya yakni pegawai (ASN). Peran pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting, karena dapat memberi dampak terhadap pelaksanaan kinerja pegawai kedepannya. Dengan adanya kebijakan dalam penerapan elektronik government dapat dikatakan sebagai salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam dunia pemerintahan. Penerapannya telah menjadi kebutuhan sekaligus dapat dikatakan sebagai tuntutan dalam pelayanan publik di era teknologi saat ini. Sebelum adanya penerapan pemerintahan berbasis elektronik (Elektronik Government), proses penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat Dumai Kota dilakukan secara manual dan terkadang mengharuskan setiap pegawai turun langsung ke lapangan sehingga tidak jarang muncul kesalahan-kesalahan maupun permasalahan

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui sejauh mana penyelenggaraan atau pelaksanaan elektronik government di Kecamatan Dumai Kota dalam menerapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai guna terlaksananya pengembangan elektronik government secara nasional dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Implementasi yang berhasil tidak hanya terdiri dari dua perspektif yaitu keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas dan keberhasilan implementasi ditunjukkan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, namun ada perspektif lainnya yang mengatakan bahwa implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang diinginkan dari suatu program dan dampak dari program. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, maka ada dua pilihan langkah yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dan kebijakan publik tersebut, (Riant Nugroho,2003).

Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip teori G. Shabber Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan
Mencakup tipe sistem politik, struktur pembuat kebijakan, karakteristik struktur politik lokal, kendala sumber daya, sosio kultural, derajat keterlibatan para penerima program, serta tersedianya infrastruktur fisik yang cukup
2. Hubungan antar organisasi
Mencakup kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran implementasi dan evaluasi, ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi serta efektivitas jejaring untuk mendukung program
3. Sumberdaya organisasi
Mencakup kontrol terhadap sumber dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran, pendapatan yang cukup untuk pengeluaran, dukungan pemimpin politik pusat maupun lokal, serta komitmen birokrasi
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
Mencakup keterampilan teknis, manajerial dan politis petugas, kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan, dukungan dan sumber daya politik instansi, sifat komunikasi internal, hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran, hubungan instansi dengan pihak diluar pemerintah, kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan, komitmen petugas terhadap program, serta kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Subarsono, 2005:101).

Faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal, serta berbagai keluaran dan hasil yang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Dumai Kota dan Dinas/Instansi/Lembaga yang terkait implementasi elektronik government. Adapun subjek informan berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Kantor Kecamatan Dumai Kota yakni Camat Dumai Kota, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset, staf pelaksana dan 2 (dua) orang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yakni Kepala Seksi Tata Kelola Elektronik Government dan staf pelaksana. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan dokumentasi bersama dengan informan, sedangkan data sekunder yakni data atau dokumen resmi yang berasal dari Kantor Kecamatan Dumai Kota, peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian serta jurnal, tesis dan berita media online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan observasi lapangan. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelayanan dan peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan, maka pemerintah daerah harus dapat melakukan kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lazim disebut *elektronik government*. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan elektronik government ini.

Mengenai elektronik government ini akan dibahas dengan menggunakan teori oleh G Shabber Cheema dan Dennis A Rondanelli yang mempertimbangkan bahwa ada 4 unsur kriteria yang menjadi pengukuran implementasi kebijakan program, yakni sebagai berikut :

Kondisi Lingkungan

Implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai Kota yang mencakup kondisi lingkungan sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi sosiokultural dan keterlibatan para penerima program dalam hal ini pegawai Kecamatan dan masyarakat yang sudah menjalankan elektronik government dengan cukup baik. implementasi elektronik government dalam pelayanan public maupun administrasi pemerintahan telah berlangsung di Kota Dumai secara eksternal tidak hanya di Kecamatan Dumai Kota saja melainkan sudah berlangsung di 6 Kecamatan lainnya yang ada di Kota Dumai. Sedangkan secara internal, disetiap bidang yang ada di Kecamatan Dumai Kota saat ini sudah serentak melaksanakan program elektronik government, diantaranya seperti aplikasi e-Office dalam hal surat menyurat, absensi elektronik (e-absensi) dalam hal kehadiran pegawai dan e-planning dalam kegiatan musrenbang.

Bentuk efisiensi yang di peroleh dari implementasi elektronik government ini diantaranya yaitu : dalam hal pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih sistematis, waktu menjadi lebih cepat dan tidak banyak terbuang seperti pada saat pengurusan perizinan dan administrasi kependudukan, serta tidak membutuhkan biaya operasional yang banyak dibandingkan saat masih manual menggunakan kertas, masyarakat tidak harus datang ke kantor pemerintahan dan pegawai juga tidak perlu turun langsung kelapangan, cukup dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet.

Hubungan Antar Organisasi

Program elektronik government memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintahan dalam melaksanakan urusan dan tugas

pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya dalam hal hubungan antar organisasi penerima program kebijakan elektronik *government sudah cukup baik hal ini dibuktikan dengan hubungan kerjasama yang baik dan sikap keterbukaan* para penerima program menghadapi perubahan sistem layanan administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kecamatan Dumai Kota. Sejauh ini beberapa kelembagaan sudah bersinergi dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan sehingga tercipta pola kerjasama yang cukup baik terkait penerapan elektronik government.

Sumber Daya Organisasi

Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia khususnya aparatur pemerintah baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna elektronik government sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penataan dalam pendayagunaan, yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam penerapan elektronik government di Kecamatan Dumai Kota, sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non manusia (non-human resources) yang meliputi infrastruktur, sarana dan prasara sudah ada tapi masih belum secara maksimal untuk mendukung dalam pengelolaan dana. Selain itu sanksi yang berlaku sudah berjalan namun masih perlu peningkatan pengawasan agar aparatur lebih sadar akan tanggung jawab kerja.

Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Layanan digitalisasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan internet dan juga tata kelola kelembagaan yang mendorong penyelenggaraan elektronik government di Kecamatan Dumai Kota. Selanjutnya karakteristik dan kemampuan pelaksana dalam tatanan kelembagaan dan kebijakan implementasi elektronik government di Kota Dumai khususnya Kecamatan Dumai Kota sudah baik, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota sebagai pedoman dalam pelaksanaan elektronik government di Kota Dumai. Namun untuk mengoptimalkan implementasi elektronik government juga dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil kebijakan, serta dibutuhkan koordinasi dalam penerapan elektronik government dengan selalu memberikan motivasi akan budaya kerja berbasis elektronik (elektronik government) di lingkungan pemerintahan Kota Dumai.

Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja pegawai, adanya penerapan elektronik government telah mampu meningkatkan kuantitas kerja dan ketepatan waktu pegawai walaupun dalam hal kualitas kerja belum nampak perbedaan yang signifikan namun secara keseluruhan sudah ada perubahan yang nyata dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Kecamatan Dumai Kota.

Faktor Yang Menghambat

Beberapa faktor yang menghambat implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai Kota, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis di Kecamatan

Untuk meningkatkan kinerja SDM dalam implementasi elektronik government, haruslah dengan menetapkan dan mengembangkan standar kompetensi teknis SDM yaitu pengembangan pola karir dan remunerasi SDM. Hal ini dilakukan agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemberian layanan elektronik government bisa berjalan dengan baik, berkesinambungan dan memenuhi harapan penggunaannya. sumberdaya yang ada di tingkat

kecamatan masih sangat terbatas untuk tenaga ahli di bidang pengelolaan TIK, yang kebanyakan hanya Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) yang sewaktu waktu bisa memutuskan hubungan kerja atau mengundurkan diri dan bukan dari tenaga ASN sehingga dalam penyelenggaraan elektronik government di Kecamatan Dumai Kota ini kurang optimal.

2. Kurangnya Dukungan Pendanaan dan Anggaran

Terkait penganggaran dan pendanaan untuk pelaksanaan elektronik government ditemukan bahwa penganggaran untuk teknis pelaksanaan elektronik government yang ada masih sangat minim dan tidak sesuai dengan jumlah Sumber daya yang ada. Keterbatasan pendanaan dalam penerapan elektronik government ini bisa berpengaruh pada rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi. Kurangnya dukungan pendanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi salah satu alasan kegagalan implementasi elektronik government.

3. Sistem Aplikasi Sistem Aplikasi yang Belum Terintegrasi

Upaya perbaikan sistem informasi dalam penyajian konten-konten yang berkaitan dengan layanan unit kerja pemerintah Kecamatan Dumai Kota dapat diakses secara elektronik oleh penggunanya/masyarakat. Hal tersebut bisa terealisasi jika aplikasi-aplikasi yang ada saling terhubung atau terintegrasi dengan semua unit di SKPD Kota Dumai. Namun proses sistem aplikasi dalam implementasi elektronik government di Kota Dumai masih belum optimal dikarenakan masih belum terintegrasinya sistem aplikasi dalam berbagi data dan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal seharusnya dengan adanya system aplikasi yang sudah terintegrasi, sudah tidak memerlukan lagi dokumen-dokumen manual kertas sebagai persyaratan administrasi pemerintahan.

SIMPULAN

Tentang Implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai Kota, setelah masing-masing indikator diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai Kota sudah cukup baik. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa indikator, yaitu : a). *Kondisi Lingkungan*, bahwa sudah ada kondisi lingkungan sosio,kultural dan keterlibatan para penerima program dalam pengelolaan elektronik government. b). *Hubungan antar Organisasi*, bahwa adanya sikap keterbukaan para penerima program menghadapi perubahan system layanan pemerintahan di Kecamatan Dumai Kota. c). *Sumber Daya Organisasi*, pengembangan dan peningkatan potensi sumberdaya manusia khususnya aparatur pemerintah baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna elektronik government (e-gov) sudah cukup baik. d). *Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana*, bahwa tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam implementasi elektronik government mampu meningkatkan kinerja pegawai dari segi layanan publik maupun pemerintahan Meskipun pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
2. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menghambat implementasi elektronik government dalam meningkatkan kinerja pegawai yakni : (a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis di Kecamatan, (b) Kurangnya dukungan pendanaan dan anggaran, serta (c) Proses sistem aplikasi yang belum terintegrasi.

SARAN

Saran yang diperlukan sebagai masukan atau bahan pertimbangan pihak terkait agar implementasi elektronik dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Dumai kota lebih baik lagi di masa mendatang adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intens dengan memberikan edukasi mengenai elektronik government secara khusus di lingkungan masyarakat, meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait, melengkapi dokumen-dokumen administrasi pendukung di setiap OPD, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai tentang pemahaman dan penguasaan hal-hal yang terkait elektronik government dengan kewajiban pekerjaan serta lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil kebijakan.
- b. Penempatan pegawai yang berkompotensi sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahliannya, melaksanakan bimbingan teknis bagi para pegawai yang berhadapan langsung dengan elektronik government, adanya dukungan pemerintah yang kuat dalam penyediaan anggaran serta ada upaya untuk mengintegrasikan antar komponen yang dibutuhkan baik menyangkut integritas data, aplikasi, bahkan komunikasi sistem informasi dengan pihak internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- A.G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Azkiya, H. 2018. *Penerapan E-Government dalam peningkatan Pelayanan Publik*, Journal of Materials Processing Technology, 1(1), 1–8.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Faizah, N. & Sensuse D. I. 2009. *Faktor-Faktor sukses Implementasi E-Government di Empat kabupaten di Indonesia*. Digital Information dan System Conference.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Suharsimi, Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ayu Aditya Oktavya, E-Journal Ilmu Pemerintahan, *Penerapan Elektronik Government (e-Government) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang*. Universitas Mulawarman volume 3 nomor 3 1433-1447 Tahun 2015
- Yuwelso, E-Journal Pemerintahan Integratif, *Pemanfaatan Elektronik Government Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai (Studi Kasus Penggunaan Absensi Elektronik di Kantor Bupati Malinau)* Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4 2337-8670 Tahun 2016
- Lisa Megawati, E-Journal Ilmu Administrasi Negara, *Pengaruh Pemanfaatan E-Government Terhadap Disiplin Pegawai di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja* Universitas Muhammadiyah makasar volume 2 nomor 6 Tahun 2021
- Yana Suharyana, E-Journal Kebijakan Pembangunan Daerah, *Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten*, Kota Serang Volume 1 Nomor 1 Juni 2017 | 45– 58